PARTISIPASI MASYARAKAT INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI BAGI SISWA SMK

Oleh:
Yoto
Dosen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Email: yoto.1718@yahoo.com

Abstrak: Partisipasi masyarakat industri dalam pelaksanaan praktik kerja industri bagi siswa SMK meliputi partisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan, partisipasi evaluasi pelaksanakan program, dan pemanfaatan hasil pendidikan.Industri dapat berperan sebagai sumber belajar, tempat belajar, dan sarana pendidikan bagi siswa SMK. Partisipasi masyarakat industri menjadi sangat pentingbagi sekolah kejuruan karena sekolah memerlukan masukan dari industri dalam menyusun program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri,dan masyarakat industri harus menjadi partner sekolah kejuruan dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran.Kerjasama antara sekolah dan industrimenjadi sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik menjadi manusia unggul yang produktif, inovatif dan produktif. Dalam hal demikian, sekolah memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai partner masyarakat industri dan sebagai penghasil tenaga kerja terampil yang terdidik untuk memenuhi kebutuhan industri.

Kata Kunci: partisipasi, masyarakat industri, praktik kerja industri

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlah mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara (UUSPN No.20/2003, Pasal 1 ayat 1). Pendidikan merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek perilaku lainnya kepada generasike generasi. Proses transmisi tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat termasuk dunia usaha dan industri.

Mutu pendidikan merupakan masalah yang dijadikan agenda utama untuk diatasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang bermutu akan diperoleh lulusan bermutu yang mampu membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Sistem Pendi-dikan Nasional telah menggariskan ketentuan minimum bagi satuan pendidikan formal agar dapat memenuhi mutu pendidikan. Lebih lanjut Standar pelayanan minimal pendidikan telah diatur dalam Kepmendiknas No. 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang pedoman penyusunan

standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan, adalah bertujuan: (1) mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan/atau meluaskan pendidikan dasar; (2) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar; (3) meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; (4) menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. Untuk melaksanakan tujuan pendidikan tersebut, penyelenggaraan pendidikan di SMK berpedoman pada tujuan pendidikan nasional.

Lebih lanjut dalam Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Bab XV, Pasal 54 dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, dan masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah terutama dari pengusaha, dunia usaha dan industri yang sangat terkait dengan keberadaan sekolah menengah kejuruan; baik sebagai pengguna maupun sebagai institusi pasangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah kejuruan (SMK). Partisipasi masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak daripada sekadar kewajiban. Partisipasi sebagai hak atas warga menurut Dwiningrum (2010) perlu diupayakan dalam kehidupan masyarakat karena partisipasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Kontrol masyarakat terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan pembangunan dibidang pendidikan harus dimaknai sebagai hak masyarakat untuk ikut mengontrol agenda dan urutan prioritas pembangunan pendidikan.

Kebijakan *Link and match* (keterkaitan dan kesepadanan) antara SMK dan industri dalam penyenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SMK (Djoyonegoro, 1997). Kebijaksanaan *Link and match* mengarahkan agar pendidikan benar-benar menjadi pranata utama pembangunan sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan nasional. Maka sejak awal diimplementasikan kebijakan tersebut selalu diwarnai dengan berbagai upaya penyempurnaan yang lebih berorientasi kepada kebutuhan pemakai tamatan dan pola penyelenggaraan dalam bentuk Pendidikan Sistem Ganda (PSG).

Kebijakan *Link and Match* merupakan alat atau wahana untuk membangun kemitraan dengan industri dalam menentukan prioritas serta menyusun bentuk dan materi program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan (Djoyonegoro, 1997:5). Tujuannya adalah agar perencanaan program pendidikan dan pelatihan kejuruan harus memperhatikan kecenderungan signal pasar kerja, sehingga para siswa dapat meraih kesempatan maksimal dalam merebutkan lapangan kerja yang tersedia dan memiliki keterampilan dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan karir kerjanya.

Priyowirjanto (2001:10-11) menjelaskan bahwa karakteristik sistem pendidikan dan latihan pada pendidikan kejuruan menuntut program pendidikan yang memiliki karakteristik: (1) jenis program dikembangkan atas dasar tuntutan kebutuhan dunia kerja (*demand driven*), (2) program pembelajaran yang dikembangkan dan dilaksanakan mengacu pada pencapaian kompetensi terstandar, (3) program diklat yang dilaksanakan dirancang secara terintegrasi antara program pembelajaran di sekolah dengan pelatihan didunia kerja. Memperhatikan pendapat Priyowirjanto tersebut menunjukkan betapa pentingnya kemitraan antara sekolah dan dunia usaha/industri agar apa yang dilakukan disekolah benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Untuk itu maka partisipasi dari pihak industri untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran dengan program *dual system education* sangat diperlukan oleh pihak sekolah.

Sonhadji (2002) menyatakan bahwa terdapat tiga karakteristik utama pendidikan teknik yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraannya, yaitu: (1) menekankan pada ranah psikomotorik, (2) sesuai dengan perkembangan teknologi, dan (3) orientasi pada bidang pekerjaan. Dengan merujuk pada karya Finch dan Crukilton (1989) mengasosiasikan ranah psikomotorik ini dengan tujuan kinerja fisik (*Physical performance objectives*). Tujuan kinerja fisik tersebut meliputi: membuat identifikasi fisik, melakukan tindakan fisik sederhana, melakukan tindakan keterampilan fisik, melakukan tindakan keterampilan yang tepat untuk memecahkan masalah, dan menentukan produk fisik yang layak. Sementara itu, ranah kognitif diasosiasikan dengan tujuan kinerja verbal (*verbal performance objectives*), dan ranah afektif diasosiasikan dengan tujuan kenerja sikap (*attitude performance objectives*). Selain menekankan pada ranah psikomotorik, maka pendidikan teknologi harus mampu mengikuti perkembangan sains dan teknologi, serta berorientasi kepada bidang pekerjaan sesuai tuntutan dan kebutuhan dunia usaha/industri.

Berdasarkan uraian diatas, maka uraian berikut memfokuskan perhatian pada kajian tentang "Partisipasi Masyarakat Industri Dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Bagi Siswa SMK".

JENIS PARTISIPASI MASYARAKAT INDUSTRI TERHADAP SMK

Keahlian profesi dengan segala aspeknya sebenarnya telah lama dikenal di Indonesia dan diperoleh melalui proses bekerja secara langsung pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang profesinya (Djoyonegoro, 1997). Kemampuan tenaga kerja tingkat menengah di Indonesia diharapkan dihasilkan oleh sekolah menengah kejuruan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Lembaga pendidikan tingkat menengah kejuruan mengemban empat misi pokok, sebagaimana diuraikan oleh Djoyonegoro (1994) yaitu: (1) meningkatkan efisiensi, (2) meningkatkan kualitas, (3) meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan (4) meningkatkan relevansi lulusan sekolah kejuruan.

Memperhatikan pentingnya pertisipasi masyarakat industri dalam bidang pendidikan, maka bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan

seyogyanya bersifat kemitraan (*partnership*). Kemitraan antara lembaga pendidikan menengah kejuruan (SMK) dan industri haruslah dirancang dengan cermat dan senantiasa dikembangkan guna meningkatkan program pendidikan yang telah dirancang oleh sekolah. Oleh karena itu kerangka berfikir kreatif inovatif sangat diperlukan dalam menyusun suatu program pengembangan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

Ada bermacam-macam tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan kejuruan.Partisipasi masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 7 tingkatan (Depdikas, 2005), yang dimulai dari tingkat terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkatan partisipasi masyarakat terinci sebagai berikut: (1) Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, (2) Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, (3) Peran serta secara pasif; artinya, menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak sekolah (komite sekolah), (4) Peran serta melalui adanya konsultasi, (5) Peran serta dalam pelayanan pendidikan di sekolah, (6) Peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan/dilimpahkan, (7) Peran serta dalam pengambilan keputusan. Dalam hal yang terakhir ini masyarakat/industri terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan (baik akademis maupun non akademis) dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan dan peningkatan mutu sekolah.

Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 8, menjelaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; sedangkan pada pasal 9, menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan (Pasal 10) pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Amerika Serikat, Raelin (2008) mereferensikan pembelajaran berbasis pekerjaan sebagai komponen dari peraturan pendidikan. Sebagian besar para ahli memandang bahwa aktifitas yang relatif terstruktur yang dikonstitusikan di tempat kerja dapat membekali murid dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat sukses dalam pekerjaan dan lingkungan sosial (Raelin, 2008: 46). Pada pembelajaran ini menunjukkan bahwa pembelajaran ditempat kerja dipandang efektif untuk dilaksanakan karena dapat memberikan bekal pengetahuan tentang bagaimana melakukan aktifitas pekerjaan di dunia kerja/industri, memberikan bekal keterampilan kerja yang sesungguhnya kepada para siswa di industri serta melatih dan mengkondisikan siswa untuk memiliki sikap disiplin dalam mentaati semua peraturan dalam dunia kerja/industri.

Finlay (1998) menyebutkan bahwa di negara-negara maju menerapkan *Competency Based Education and Training (CBET)* atau Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK), karena menyadari jenis pendidikan inilah yang mampu mendukung persaingan dalam bidang perdagangan dan perekonomian. Amerika serikat tidak segan-segan mengkaji kontribusi pendidikan kejuruan atas keberhasilan industri di Jerman.

Keberhasilan Jerman dalam pendidikan kejuruan menurut Finlay tidak lepas adanya partisipasi masyarakat industri terhadap pendidikan kejuruan.

Negara-negara yang bergabung dalam *Organisation For Economic C0-Operation And Development (OECD)*hampir semua menggunakan model pendidikan sistem ganda (*Dual System Education*), model pendidikan ini dimaksudkan untuk membantu dalam mensukseskan masa transisi antara sekolah dan bekerja untuk para siswa. Menurut OECD (2010:30) pendidikan sistem ganda menghasilkan 2 nilai kontrak yang disepakati antara sekolah dan industri, yaitu: (1) pembayaran kepada setiap siswa yang magang di industri di bayar dengan upah yang rendah, (2) industri berkomitment untuk selalu menjalin kerjasama dan selalu mengadakan pelatihan-pelatihan ke setiap siswa yang magang. Ini menunjukkn bahwa partisipasi masyarakat industri di negara-negera yang tergabung pada OECD memiliki partisipasi yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan kejuruan.

Pendidikan teknologi dan kejuruan baik di tingkat menengah atas maupun pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan tenaga terdidik dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja/industri (Reksoatmodjo, 2010). Selanjutnya Reksoatmodjo menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan dan teknologi perlu mengadakan kerja sama dengan dunia industri untuk menyelaraskan materi kurikulum dan membuka kesempatan pemagangan (*apprenticeship*). Partisipasi masyarakat industri dalam pemagangan memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan dan indutri yang bersangkutan dalam berbagai segi dengan prinsip saling menguntungkan dari kedua pihak.

MAKSUD DAN PENTINGNYA HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT INDUSTRI TERHADAP SMK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah kejuruan sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan kejuruan, disarankan perlunya memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah secara optimal.Hal ini penting, karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang revelan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat memerlukan jasa sesuai yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat terjadi, jika kepala sekolah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan *(mutualisma).*Sebenarnya di sekolah sudah ada petugas khusus untuk membina hubungan dengan masyarakat, yaitu wakil kepala sekolah urusan humas.Dengan demikian yang penting bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi petugas tersebut.

Dalam pendidikan di SMK peran hubungan masyarakat (Humas) sangat penting dan pegang peran yang strategis dalam menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat terutama kepada masyarakat industri sebagai institusi pasangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan dari hubungan masyarakat menurut Suryosubroto (2012:72) adalah: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sekolah, (2) meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan dan

aspirasi masyarakat terhadap sekolah, (3) mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan pendidikan dalam era pembangunan, dan (4) mejalin kerja sama untuk memenuhi kebutuhan anak didik dalam setiap kegiatan pendidikan di sekolah.

Mulyasa(2008:164) mengemukakan maksud hubungan **s**ekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut: (1) untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah, (2) untuk menilai program sekolah, (3) untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik, (4) untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan, (5) untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, (6) untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah, (7) untuk mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.

Hubungan sekolah dengan masyarakat industri sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat industri sebagai sumber belajar.Selanjutnya bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap sekolah. Berbagai teknik dan media dapat dilakukan dalam konteks ini, seperti mengadakan rapat atau pertemuan, surat menyurat, buku penghubung, buletin sekolah, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi peserta didik maupun masyarakat.

Model manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat industri merupakan seluruh proses kegiatan sekolah yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinyu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat industri yang berkepentingan langsung dengan sekolah terkait dengan ketenagakerjaan. Dengan demikian, kegiatan operasional pendidikan, kinerja, dan produktivitas sekolah diharapkan semakin efektif, dan efisien.

Pada hakikatnya, SMK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat industri, karena keduanya pada dasarnya adalah saling membutuhkan dan ketergantungan.Di amerika menurut survey dari satu sekolah terdapat 85% industri menawarkan magang kepada siswa (OECD, 2010:35). Dengan caramenjadikan siswa magang harian bila siswa sukses siswa akan magang lebih lama diperusahaan tertentu. Gabungan dari sekolah dan industrimenurut OECD menjadikan sebuah metode yang efektif dan sangat kokoh untuk mempersiapkan siswa dalam mengadapi dunia kerja. Demikian pula hasil pendidikan yang berupa lulusan, akan menjadi harapan dan dambaan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh menjadi "menara gading" bagi masyarakat.

Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan pendidikan, menyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakatmenjadi semakin penting, terutama masyarakat industri yang terkait langsung dengan sekolah yang bersangkutan. Pendidikan kejuruan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, serta memperoleh simpati dari masyarakat

industri, jika dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi dengan segenap masyarakat industri dan lingkungannya, melalui manajemen pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat industri.Menurut Suryosubroto (2012:72) terjadinya hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat akan bermanfaat bagi sekolah, yaitu: (1) memudahkan sekolah untuk memperbaiki kondisi pendidikan, (2) memperbesar usaha untuk meningkatkan kinerja dan profesi staf sekolah, (3) sekolah mendapatkan bantuan dan dukungan dari masyarakat serta memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah. Sedangkan manfaat bagi masyarakat (Suryosubroto, 2012) adalah: (1) masyarakat mengetahui program-program dan inovasi yang dilakukan sekolah, (2) masyarakat mengetahui semua kegiatan yang dilakukan sekolah dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan masyarakat, dan (3) masyarakat dapat menyalurkan partisipasinya.

Menurut Mulyasa (2008:165) hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat.Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien.Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberi informasi tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Pada masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan, sekolah dituntut lebih aktif dan kreatif untuk mengembangkan hubungan kerja sama yang lebih harmonis.

Agar tercipta hubungan dan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat industri, masyarakat industri perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi sekolah ini dapat diinformasikan kepada masyarakat industri dan masyarakat luasmelalui laporan kepada orang tua murid, mengundang dunia usaha/industri, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran sekolah, *open house,* kunjungan ke sekolah, penjelasan oleh tenaga kependidikan sekolah, radio dan televisi, serta laporan tahunan.

Dalam memberdayakan masyarakat industri dan lingkungan sekitar sekolah, kepala sekolah dan guru merupakan kunci keberhasilan, yang harus menaruh perhatian terhadap apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan penguna (dunia usaha/industri) dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat industri dan masyarakat luas guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk:(1) saling pengertian antara sekolah dengan masyarakat industri, orang tua,dan lembaga-

lembaga lain yang ada di masyarakat,(2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing,(3) kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat, dan (4) masyarakat merasa bangga dan ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.

Dengan memberdayakan masyarakat industri dan lingkungan sekitar sekolah diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu meningkatnya kinerja sekolah dan terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas ini tampak dari penguasaan peserta didik terhadap berbagai kompetensi dasar yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja di dunia usaha/industri, melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hidup di masyarakat secara layak, dan belajar untuk terus meningkatkan diri sesuai dengan asas belajar sepanjang hayat.

Partisipasi masyarakat industri mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat industri secara nyata dalam suatu kegiatan.Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan termasuk magang siswa/guru di industri.Menurut Mulyasa (2008) dalam sistem pemerintahan yang kebijakannya bersifat *top-down,* partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan, namun pada sistem pemerintahan yang *bottom-up,* tingginya partisipasi masyarakat dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

Koentjaraningrat (dalam Mulyasa, 2008) menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tipologinya, ialah patisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif.Partisipasi kuantitatif menunjuk pada frekuensi keikutsertaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan, sedangkan partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya.Partisipasi masyarakat juga dapat dikelompokkan berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya. *Pertama,* partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus. *Kedua,* partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktifitas bersama pembangunan. Thoha (1995) menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tiga kelompok, yaitu partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, partisipasi mobilisasi, dan partisipasi seremoni.

Dalam rangka desentralisasi dan demokratisasi pendidikan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan.Masyarakat harus menjadi partner sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, karena kerjasama di antara keduanya sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik (Dwiningrum (2011).Dalam suasana yang demikian, sekolah memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai partner masyarakat dan sebagai penghasil tenaga kerja terdidik. Sebagai partner masyarakat, sekolah akan dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang di dalam lingkungan masyarakat, bahan bacaan, tontonan, dan kondisi sosial ekonomi. Sekolah juga harus bertanggung jawab terhadap perubahan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui fungsi layanan bimbingan, dan forum komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Di sisi lain,

kesadaran peserta didik untuk mendayagunakan masyarakat sebagai sumber belajar dipengaruhi oleh kegiatan dan pengalaman belajar yang diikutinya di sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sekolah dan masyarakat merupakan *partnership* dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, di antaranya: (1) Sekolah dengan masyarakat merupakan satu keutuhan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik, (2) Sekolah dengan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat, bukan saja dalam melakukan pembaruan tetapi juga dalam menerima berbagai konsekuensi dan dampaknya, serta mencar: alternatif pemecahannya. (3) Sekolah dengan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di sekolah, untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan peserta didik.

Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan rasional (Depdikbud, 1994)yaitu: (1) adanya kesesuaian antara fungsi pendidikan yang dimainkan oleh sekolah dengan kebutuhan masyarakat; (2) ketetapan sasaran dan target pendidikan yang ditangani oleh sekolah ditentukan oleh kejelasan perumusan kontrak antara sekolah dan masyarakat; dan (3) keberhasilan penunaian fungsi sekolah sebagai layanan pesanan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ikatan objektif antara sekolah dan masyarakat. Ikatan objektif ini dapat berupa perhatian, penghargaan, dan bantuan tertentu; seperti dana, fasilitas, dan bentuk bantuan lain, baik bersifat ekonomis maupun non-ekonomis, yang memberikan makna penting pada ekosistem dan hasil pendidikan.

Sejalan dengan bergulirnya roda reformasi yang didorong oleh para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya persepsi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini terutama berangkat dari tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membekali anaknya dengan berbagai pengetahuan dan teknologi sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kondisi tersebut menjukkan bahwa manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat perlu senantiasa dikembangkan (Leslie dalam Mulyasa, 2008).

PARTISIPASI MASYARAKAT INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI BAGI SISWA SMK

Kerjasama Sekolah dan Industri

Sektor industri dan lembaga pendidikan kejuruan pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain. Keduanya memerlukan hubungan hubungan yang serasi, saling menunjang dan saling menguntungkan. Ditinjau dari segi kehidupan dunia usaha dan industri, kebutuhan peningkatan teknologi dan mutu produksi merupakan masalah yang perlu segera dipecahkan. Sebaliknya lembaga pendidikan kejuruan sangat membututuhkan dana guna memperlancar keotonomian dan menuju lembaga yang swadana.

Salah satu yang dibutuhkan industri adalah sumber daya manusia yang terdidik, handal, yang mampu menjawab berbagai tantangan. Selain itu dunia usaha/ industri membutuhkan suatu program yang dapat

membantu para profesional untuk mempertajam keterampilan dan mengikuti kemajuan teknologi.Kebutuhan–kebutuhan tersebut membutuhkan berbagai kesiapan dan kemampuan untuk menghadapinya. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menjalin kerjasama antara dunia usaha/industri dengan lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pada dasarnya setiap SMK harus menjalin kerjasama dengan DU/DI. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 29/1990 pasal 7 Tentang Pendidikan Menengah, yang menyebutkan bahwa pendirian sekolah kejuruan harus pula memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha dan industri. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud No. 0490/U/1992) Kerjasama SMK dengan dunia usaha/industri terutama bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian program SMK dengan kebutuhan dunia kerja yang diusahakan dengan asas saling menguntungkan

Bentuk kerjasama antara industri dengan SMK secara timbal balik dapat dijabarkan: (1) Dari SMK ke industri; kerja sama dilakakukan:pengenalan Dunia Usaha/Dunia Industri (Du/Di), praktek kerja bagi siswa, magang industri bagi guru produktif, kunjungan studi, pemanfaatan industri sebagai sumber belajar, (2) Dari industri ke SMK; disini industri dapat memberikan masukan dan informasi tentang: input PSB (Pusat Sumber Belajar), informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bantuan beasiswa, pengembangan kurikulum, pameran, rekrutmen tenaga kerja dan bantuan sarana dan prasarana atau dana pendidikan, uji kompetensi siswa/guru.

Langkah-langkah yang diperlukan sekolah dalam usaha menjalin kerjasama menurut Wena (1996) antara lain: (1) memilih industri pasangan sebagai mitra kerja, dalam kegiatan ini sekolah harus memilih industri yang kiranya tepat untuk tempat belajar siswa; (2) guna menjalin kerjasama dengan industri yang telah ditentukan sebagai tempat belajar, maka pihak sekolah harus mendatangi industri yang bersangkutan. Dalam hal ini pihak sekolah menjelaskan tujuan kerjasama, bentuk kerjasama, waktu pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan penjelasan yang demikian maka diharapkan pihak industri mau memberi tempat belajar pada siswa sekolah kejuruan; (3) setelah pihak industri bersedia diajak kerjasama, maka harus dibuatkan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama itu hendaknya memuat hal-hal seperti: tujuan kerjasama, bentuk kerjasama, pelaksanaan kerjasama, pelaksanaan kegiatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dan hal lain yang dianggap perlu; (4) kemudian setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, mulailah kedua belah pihak untuk merealisasi kerjasama tersebut, dalam bentuk kegiatan – kegiatan nyata (Wena, 1996:114 – 115).

Dari hasil studi (Priyono, 1994) menyimpulkan bahwa proses pendidikan teknologi dan kejuruan berlangsung pada beberapa tempat, yaitu (a) kelas 27 %; (b) bengkel sekolah 17 %; (c) unit produksi sekolah 17 %; (d) pusat fasilitas pelatihan 12 %; dan (e) di tempat kerja 43 %. Sehingga jika dilihat dari komposisi prosentase, nampaknya pelajaran praktik lebih ditekankan, dengan kata lain bahwa prosentase pengajaran praktik lebih besar

dari pengajaran teori.Mengacu pada hasil penelitiaan Priyono (1994) dapat menggambarkan bahwa pemanfaatan dunia industri sebagai sumber belajar oleh lembaga pendidikan kejuruan perlu dilaksanakan secara sistematis. Agar proses belajar pada situasi dunia kerja yang nyata dapat mencapai hasil optimal, tentu keterkaitan pembelajaran di sekolah dengan apa yang dipelajari harus betul-betul diperhatikan, kegiatan belajar dalam situasi dunia nyata; sedangkan belajar di sekolah bersifat belajar *conditioning* atau dikondisikan.

Untuk mendukung proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil optimal, materi di sekolah lebih ditekankan pada pembelajaran teori-teori kejuruan, sedangkan materi di industri lebih ditekankan pada praktik kerja yang relevan dengan teori-teori yang telah dipelajari di sekolah. Dengan demikian sekolah harus menggunakan dunia kerja sebagai landasan dalam perencanaan kurikulum (Starrand Zahnizer, 1982) sehingga ada keterkaitan antara materi di sekolah dengan materi yang dipelajari di industri.

Motivasi Partisipasi Masyarakat Industri dalam pendidikan di SMK

Dunia usaha/ industri yang ikut serta secara aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan dengan sekolah menengah kejuruan (SMK), perlu diberikan rangsangan dan motivasi bagi dunia usaha/industri agar lebih antusias untuk bekerjasama dengan SMK. Direktorat Dikmenjur (1994:17) menyebutkan rangsangan yang dapat dikembangkan terhadap dunia usaha/industri dalam melakukan kerja sama dengan SMK antara lain adalah:

1). Perlakukan pajak penghasilan atas biaya latihan karyawan, permagangan dan beasiswa, sasuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 770/KMK.04/ 1990 tanggal 14 Juli 1990, dan Surat Edaran Dirjen Pajak, Ref. Nomor SE-24/PJ.3.1/1990 tanggal 18 Juli 1990.
2). Pemberian pengakuan dan penghargaan kepada industri/perusahaan pasangan SMK dalam penyelenggaraan Pendidikan dengan Sistem Ganda. Penghargaan dan pengakuan dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk yang dirasakan mempunyai nilai atau makna bagi industri/perusahaan yang bersangkutan.

Selain dua hal diatas ada beberapa alasan mengapa industri memiliki motivasi untuk berpartisipasi terhadap pendidikan pada SMK, diantaranya adalah: (1) industri dapat melibatkan diri secara langsung ke sekolah memberi masukan tentang rencana dan pelaksanaan kurikulum terutama kurikulum produktif, (2) industri dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan praktik kerja industri bagi siswa dan magang bagi para guru produktif, (3) industri dapat memperoleh manfaat dari magang siswa dan guru karena dibantu tenaga terampil dengan tanpa memberikan gajih kepada mereka, (4) industri dengan mudah mencari tenaga terampil (rekrutment) tanpa mengeluarkan biaya tinggi, (5) industri secara tidak langsung memberikan bimbingan karir terhadap siswa SMK dalam meniti pekerjaan, (6) industri merupakan bagian tak terpisahkan dari sekolah, jika industri merupakan institusi pasangan dari model pendidikan sistem ganda (PSG) dari SMK,

(7) industri secara terbuka akan dikenal oleh masyarakat luas sehingga keberadaan industri akan semakin kokoh dan dipercaya masyarakat karena kepeduliannya terhadap lembaga pendidikan.

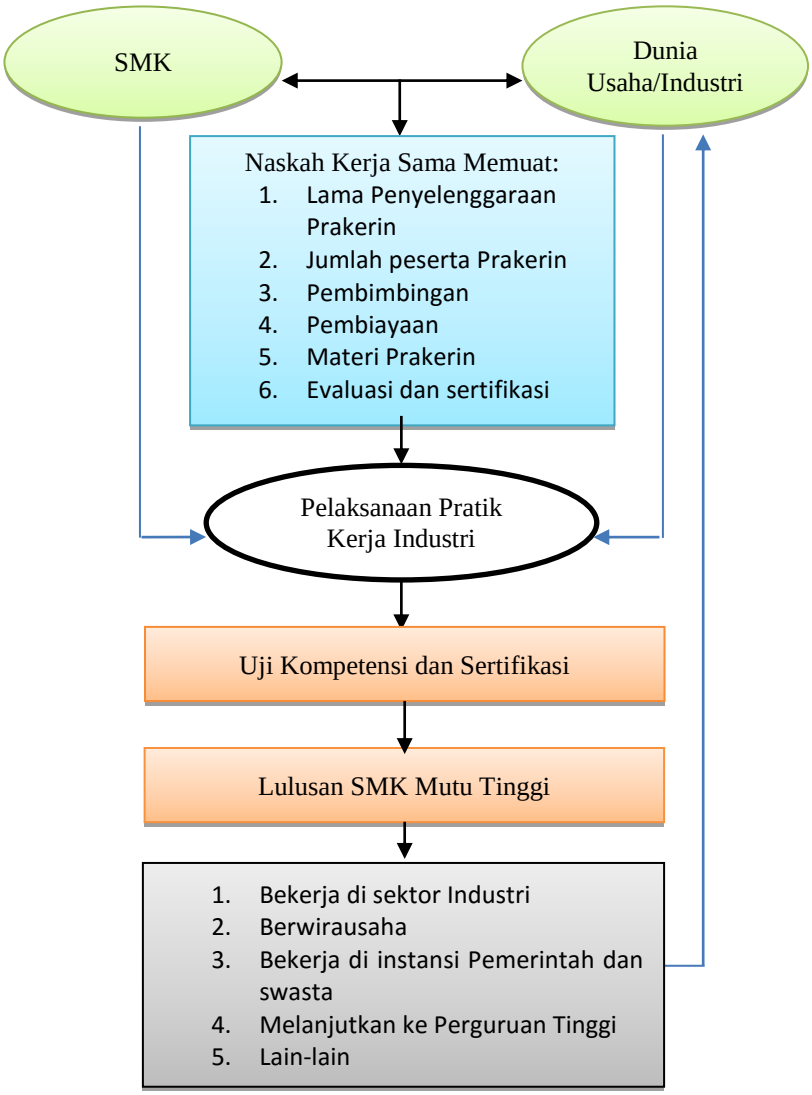
Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Bagi Siswa SMK

Praktik kerja industri adalah kegiatan pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh siswa SMK di dunia usaha/dunia industri (Du/Di).Praktik kerja industri pada dasarnya adalah merupakan kegiatan pendidikan yang integratif, dan bagian dari model Pendidikan Sistem Ganda yang dilaksanakan oleh SMK Sejak dicanangkan model Pendidikan sistem ganda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djoyonegoro (1984) dan mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 1985/1986 bagi seluruh SMK (pada saat itu STM) di negara Republik Indonesia.

Pendidikan Sistem Ganda pada dasarnya adalah suatu penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan secara tersistem kegiatan pendidikan teori di sekolah dengan kegiatan pendidikan praktik di industri atau dunia usaha (Djojonegoro, 1994). Menurut Depdikbud (1994b) pendidikan sistem ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja. Jadi pada dasarnya pendidikan sistem ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilaksanakan di dua tempat yaitu di sekolah dan industri. Tujuan penyelenggaraan pendidikan sistem ganda (Depdikbud, 1994a) adalah untuk meningkatkan kesesuaian program pada SMK dengan kebutuhan dunia kerja yang diusahakan dengan azas saling menguntungkan, hal ini sesuai dengan Keputusan Mendikbud No. 0490/U/1992, pasal 33.

Menurut Depdikbud (1994b:7) tujuan dari penyelenggaraan pendidikan dengan sistem ganda adalah: (1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, (2) memperkokoh kesepadanan dan kesesuaian antara program sekolah dengan kebutuhan dunia kerja, (3) meningkatkan efisiensi proses penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas dan professional, (4) memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dan di industri.

Praktik kerja industri yang dilaksanakan olek siswa SMK harus direncanakan pelaksanaannya oleh SMK bersama dengan Dunia usaha/industri. Perencanaan tersebut meliputi: waktu penyelenggaraan Prakerin, daya tampung dunia usaha/industri, jenis kegiatan yang akan dilaksanakan siswa, pembimbingan, pembiayaan, sertifikasi, dan lain-lain. Perencanaan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dibuatkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh SMK dan dunia usaha/industri. Jika kerja sama kedua belah pihak ini ditaati dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh maka akan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing dalam pasar kerja (lihat Gambar 1).



Gambar 1 Model Alur Penyelenggaraan Prakerin Siswa SMK

Mutu sebuah SMK dapat dilihat dari seberapa banyak lulusan yang bekerja dibanding dengan yang menganggur. Semakin banyak lulusan yang cepat mendapatkan pekerjaan, berarti mutu SMK tersebut semakin baik, bahkan pada SMK yang mutunya baik para siswanya sudah direkrut oleh dunia usaha/industri sebelum mereka lulus, seperti misalnya yang terjadi pada SMK Negeri 1 Singosari Malang yang bekerja sama dengan PT. Trakindo, siswa program keahlian Alat Berat, Ototronik, pemesinan, dan mekanik industri sebagian besar siswa sudah direkrut dunia usaha/industri sebelum lulus. Artinya setelah siswa menyelesaikan studi siswa sudah langsung bekerja pada perusahaan/industri yang merekrut. Begitu juga siswa program keahlian otomotif pada SMK Negeri 1 Singosasri Malang yang menjalin kerja sama dengan "Toyota Astra" dan "Daihatsu" hampir seluruh siswa setelah

lulus langsung direkrut perusahaan/industri tersebut.

Melihat Fenomena seperti yang terjadi pada SMK Negeri 1 Singosari Malang, maka keberadaan penyelenggaraan praktik kerja industri menjadi sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada SMK. Pedoman penyelenggaraan praktik kerja industri (Prakerin) bagi siswa SMK diatur dalam pedoman penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (Depdikbut, 1994c) sebagai berikut:(1) Waktu praktik kerja industri dilakukan selama minimal (4 – 12) bulan, (2) Praktik kerja industri dapat dilakukan sejak siswa tingkat I sampai pada siswa tingkat III, (3) Tempat praktik kerja industri dicarikan oleh sekolah, karena sudah terjalin hubungan kerja sama, (4) Sinkronisasi kurikulum antara sekolah dan dunia usaha/industri dibuat oleh kedua belah fihak, (5) Siswa dibimbing secara intensif, baik oleh pihak sekolah maupun oleh pihak industry, (6) Pengujian kompetensi dari hasil praktik industri dilakukan setelah kegiatan Praktik Industri berakhir.

Pada dasarnya penyelenggaraan program PSG mengacu pada pencapaian kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja.Standart profesi yang dimaksud harus mengandung kejelasan tentang ukuran kemampuan dan sekaligus mewujudkan kewenangan untuk melaksanakan tugas profesi tertentu.Khusus untuk program pendidikan di SMK standart profesi mengacu pada program studi dan profil kemampuan tamatan seperti tercantum pada Buku II Kurikulum SMK. Untuk mencapai standart profesi tersebut diperlukan suatu proses pendidikan dan pelatihan dengan ukuran isi, waktu, dan metode tertentu.

Penyelenggaraan Praktik kerja industri memberi keuntungan nyata bagi dunia usaha/industri, antara lain sebagai berikut:

1. Dunia usaha/industri dapat mengenal persis kualitas peserta didik yang belajar dan bekerja di perusahaan. Jika dunia usaha/industri menilai orang tersebut dapat menjadi asset, dunia usaha/industri dapat merekrut menjadi tenaga kerja. Paling tidak dapat dilepas, karena tidak ada keharusan bagi dunia usaha/industri untuk mempekerjakan mereka apabila telah tamat.
2. Pada umumnya peserta didik telah ikut dalam proses produksi secara aktif, sehingga dalam batas-batas tertentu selama masa pendidikan peserta didik adalah tenaga kerja yang dapat memberikan keuntungan.
3. Selama proses pendidikan di dunia usaha/industri peserta didik mudah diatur dalam disiplin sesuai dengan peraturan dunia usaha/industri.
4. Dunia usaha/industri dapat memberi tugas kepada peserta didik, untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi dari sekolah untuk kepentingan dunia usaha/industri.
5. Memberi kepuasan bagi dunia usaha/industri karena diikutsertakan untuk mencerdaskan bangsa dan memberikan keterampilan untuk menentukan hari depan bangsa melalui penyelenggaraan PSG dan pelaksanaan Prakerin.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang partisipasi masyarakat industri terhadap

pelaksanaan praktik kerja industri bagi siswa SMK diatas, maka disimpulkan:

1. Partisipasi masyarakat industri terhadap pelaksanaan Prakerin bagi siswa SMK memberikan manfaat yang sangat besar terhadap peningkatan mutu pendidikan pada SMK, untuk itu maka hubungan kerja sama antara SMK dan industri perlu dipertahankan dan terus dikembangkan serta ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sesuai kebutuhan perkembangan dan tuntutan pasar kerja.
2. Partisipasi masyarakat industri dalam pelaksanaan Prakerin bagi siswaSMK meliputi: proses pembuatan perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi programprakerin.

Pelaksanaan Prakerin bagi siswa SMK di industri memberikan manfaat yang besar bagi industri, yaitu: perusahaan/industri dapat dengan mudah memperoleh tenaga terampil karena sudah mengetahui keterampilan dan etos kerja sejak saat siswa melaksanakan prakerin selama pendidikan di sekolah, dan perusahaan/industri juga memperoleh keuntungan pada saat siswa melakukukan prakerin karena siswa merupakan aset/tenaga kerja terampil yang tidak harus dibayar pada saat melaksanakan kegiatan Prakerin.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 1988. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.* Jakarta: Depdikbud Dikti.

Armansyah. 2009. *Peranan dan Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri di Kota Binjai*. Tesis. Tidak Diterbitkan. Medan. Universitas Sumatra Utara.

Astuti, Zuli, 2007: Peningkatan Mutu Pendidikan (www. MediaIndonesia_Nugroho.com diakses tanggal 16 November 2011.Online)

Basrowi. 1998. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Desa Giri Gonodan Kembang Kuning Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo*. Tesis. Yogyakarta.

Beane, J.A. Toepfier, C.F. dan alesi, S.J. 1986. *Curriculum Planing and Development*. Sydney: Allyn and Bacon, Inc.

Depdikbud. 1992. *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0490/U/1992 Tentang SMK*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Depdikbud.1994a. *Pembangunan Pendidikan dan kebudayaan Menjelang Era Tinggal Landas.*Jakarta: Depdikbud

Depdikbud. 1994b. *Panduan Penyelenggaraan Sistem Ganda di SMK.* Jakarta: Depdikbud.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994c. *Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Sistem Ganda pada SMK di Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.

Depdikbud. 1999. *MemahamiKurikulum Sekolah MenengahKejuruan*. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Dirjen Dikdasmen.

Depdiknas. 2005. Paket *Pelatihan Jilid 4: Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud

Depdiknas. 2001. *Kepmendiknas Nomor. 053/U/2001, Tentang: Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan*

Menengah. Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasmen.

Dwiningrum, S.I.A. 2011.*Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar

Direktorat Dikmenjur., 1994. *Konsep Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan Di Indonesia.* Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Depdikbud.

Djojonegoro, W. 1994.Kebijakan dan Program Pengembangan Pendidikan Kejuruan di Indonesia.Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional dan Temu Karya VII Forum Komunikasi FPTK se-Indonesia*, 28 Nopember 1994, FPTK IKIP Surabaya.

Djojonegoro, W. 1997.*Keterampilan Menjelang 2020 untuk Era Global.* Jakarta: Depdikbud.

Finlay, Lan, et al. 1998. *Changing Vocational Education and Training*. London and New York: Routledge

Finch, C.R. dan Crunkilton, J.R. 1989.*Curriculum Development in Vocational and Technical Education* (3rd) ed.). Needman Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.

Finch, C.R. dan Crunkilton, J.R. 1984. *Curriculum Development In Vocational and Technical Education.* London: Allyn and Bacon, Inc.

Hamalik, O. 1990.*Pendidikan Tenaga Kerja Nasional: Kejuruan, Kewiraswastaan, dan Manajemen.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hesse, Sharlene Nagy and Biber. 2010. *Mixed Methods Research: Merging Theory with Practice.* New York: The Guildford Press.

Kepmendikbud.No. 323/U/1997 tentang *Penyelengaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan*.Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.

Kepmendikbud. No.0490/U/1992. *Sekolah Menengah Kejuruan.* Jakarta:Depdikbud

Kohen, John M. 1977. *Rural Development Partisipation,* USA: Cornel University.

Mulyasa.2008. *Menjadi Kepala Sekolah Professional*. Bandung: Remaja Rosadakarya

Murtoyo. 2004. *Kebijakan Pengembangan Dikmenjur. Makalah disampaikan dalam Penataran dan Lokakarya Manajemen Tenaga Kependidikan Tanggal 18-23 Oktober 2004 di PPPGT Bandung*. Jakarta: Direktorat Dikmenjur.

Nolker, H dan Schoenfeldt, E. 1983.*Pendidikan Kejuruan: Pengajar-an, Kurikulum, Perencanaan.* Diterjemahkan oleh: Agus Setiadi. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia OECD. 2010. *Learning For Jobs*. Synthesis Report of the Organisation For Economic C0-Operation And Development (OECD) Reviews of Vocational Education and Training

Nomor 29 Tahun 1990 tentang *Pendidikan Menengah.* Jakarta: Presiden R.I.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Tentang: *Standar Nasional Pendidikan*.

Priyono. 1994. *Sistem Pemagangan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Suatu Kajian Teoritis*. Malang: Suara Guru, hal 10.

Priyowiryanto, G.H. 2001.*Reposisi Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasmen.

Purwanto, Djandji. 2009. Manajemen Kerjasama antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan Industri (Studi Kasus di SMKN 1 Program Keahlian Alat Berat Singosari Malang). Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Sonhadji, A. 2002.*Laboratorium Sebagai Basis Pendidikan Teknik di Perguruan Tinggi (Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Teknik FT-UM Tanggal 24 September 2002)*. Malang: Depdiknas UM

Spradley, J.P. 1993. *Participant Observation*. New York:Hall Rinehart in Winston.

Suryosubroto, B. 2012. *Hubungan Sekolah dengan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.

Star, H., Merz, H., and Zahnizer, G. 1992.*Using Labor Market Information In Vocational Planing.* Columbus, The International Center In Vocational Education : The Ohio State University.

Sutrisno, Joko. 2006. *Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Bertaraf Internasional.* Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen.

Suhirman. "Mendefiisikan Partisipasi; Penelusuran Awal Atas Konsep; Tahapan Dan Dinamika Partisipasi." *Makalah* Disampaiakn Dalam Pertemuan Partisipasi Masyarakat ke-7, di Ngawi, 15-18 Juni 2003.

Sukamto. 1988. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tekonologi dan Kejuruan.* Jakarta: P2LPTK Depdikbud

Sukmadinata, N.S. (2001). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*.Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Tanuatmadja, A. 1996. Hari Depan SMK dengan PSG. *Bina Keluarga Karya Wiyata, (74) tahun XIX Januari-Pebruari 1996.*

Thoha. 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Wena, M. 1996. *Pendidikan Kejuruan Sistem Ganda*. Malang: Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas IKIP Malang.